BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai akibat dari skandal keuangan yang terkenal seperti WorldCom, Enron dan lain-lain membuat keandalan pelaporan keuangan dan profesi audit telah jatuh di bawah bayangan kecurigaan, dan peran audit komite dalam proses pelaporan keuangan telah menerima perhatian khusus. Martinez dan Fuentes (2007) menyebutkan bahwa kejadian - kejadian ini belum membuat Spanyol tak tersentuh oleh rekomendasi regulasi internasional yang ditujukan untuk membangun kembali kepercayaan terhadap informasi keuangan. Peraturan di negara ini didasarkan pada Undang-Undang Reformasi Sistem Keuangan, 2002 (UU 44/22 November 2002), yang berusaha mencapai transparansi yang lebih besar dan meningkatkan kredibilitas informasi keuangan dengan mengatur independensi auditor dan penyediaan wajib komite audit di perusahaan yang terdaftar. Sampai sekarang, komite audit telah secara sukarela dilaksanakan oleh beberapa perusahaan dari rekomendasi Kode Olivencia Good Governance (selanjutnya CGG) yang diterbitkan pada tahun 1998 .

Rainsbury, Bradbury, dan Cahan (2009) berpendapat memeriksa perusahaan yang secara sukarela mengadopsi komite audit di lingkungan Selandia Baru, dimana sebelum 2003 pembentukan komite audit benar-benar tidak diatur. Jadi, dibandingkan dengan negara lain seperti AS di mana persyaratan pencatatan New York Stock Exchange (NYSE) telah lama mengharuskan komite audit dan dimana

profil tinggi *Cadbury Code* yang diterbitkan pada tahun 1992 sangat menyarankan komite audit dengan setidaknya tiga *non-eksekutif* direksi. Sebelum tahun 2003 perusahaan Selandia Baru memiliki kelonggaran dalam memutuskan apakah komite audit harus dibentuk dan komposisinya jika ada yang terbentuk. Dengan demikian, dalam lingkungan pra 2003, keberadaan dan komposisi audit komite di Selandia Baru sangat bervariasi, memberikan kesempatan unik untuk memeriksa manfaat yang mungkin bertambah bagi perusahaan yang mengadopsi komite audit. Sejak pembentukan komite audit secara sukarela, kekuatan komite audit harus terkait erat dengan manfaat yang diharapkan terkait dengan komite audit sebagai perusahaan yang tidak memiliki insentif untuk membuat komite audit praktik terbaik kecuali itu adalah pilihan optimal.

Albring, Robinson, dan Robinson (2013) menyatakan bahwa regulator sudah lama khawatir bahwa auditor memberikan jasa layanan nonaudit (NAS) dapat merusak independensi auditor. Mengikuti kegagalan Enron yang banyak dipublikasikan, dan keterlibatan auditor Enron yaitu Arthur Andersen, kekhawatiran investor tentang independensi auditor memotivasi beberapa ketentuan dari Sarbanes-Oxley Act (Kongres AS 2002) (SOX). Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) selanjutnya mengadopsi aturan yang ditujukan untuk memperkuat independensi auditor, yang melarang auditor menyediakan berbagai macam NAS atau jasa kepada klien mereka (SEC, 2002). Satu pengecualian nyata untuk daftar terlarang NAS adalah layanan pajak, yang tetap diizinkan di bawah SOX. Namun, SOX mengharuskan perusahaan memperoleh persetujuan khusus

dari komite audit sebelum mempertahankan auditor untuk melakukan layanan pajak.

Madi, Ishak, dan Manaf (2014) berpendapat bahwa komite audit (AC) sebagai salah satu peserta tata kelola perusahaan yang penting dan berpengaruh yang bertugas membantu dewan direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi manajemen perusahaan. Dalam hal ini, dikatakan bahwa komite audit memainkan peran kunci dalam pemantauan praktik pengungkapan manajemen dan pengendalian internal. Karenanya, hasil komite audit yang efektif dalam peningkatan proses pelaporan keuangan dan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, komite audit mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan objektivitas pelaporan keuangan melalui peningkatan praktik pengungkapan informasi yang diterbitkan.

Poretti, Schatt, dan Bruynseels (2018) menyatakan bahwa sejauh ini belum ada penelitian yang menganalisis peran komite audit independen di institusi yang berbeda pengaturan. Literatur akademik berfokus pada peran auditor eksternal, terutama peran auditor *Big Four*. Contohnya, Francis dan Wang (2008) menemukan bahwa peningkatan kualitas laba untuk perusahaan dengan auditor *Big Four* ketika perlindungan investor suatu negara memberi perlindungan lebih kuat kepada investor. Fung et al. (2016) menunjukkan bahwa auditor lebih mungkin untuk mengeluarkan opini yang dimodifikasi untuk klien mereka yang penting secara ekonomi dan asosiasi ini lebih kuat di negara-negara dengan hukum yang lebih kuat. Penelitian Choi dan Wong (2007) bahwa Lima Besar

auditor memainkan peran yang lebih penting di negara-negara dengan lembaga yang lemah dibandingkan dengan negara-negara dengan lembaga yang kuat.

Davis, Soo, dan Trompeter (2000) menyatakan termotivasi oleh kekhawatiran mereka tentang independensi auditor, SEC telah mengambil tindakan memperbaiki masalah yang dirasakan, termasuk pembentukan Dewan Standar Kemerdekaan (ISB) (SEC 1998) dan peraturan baru yang membatasi jenis layanan yang dapat digunakan oleh perusahaan akuntansi menawarkan kepada klien audit mereka (SEC 2000b). Lebih lanjut, SEC telah mengisyaratkan bahwa tindakan tambahan seperti rotasi auditor wajib mungkin akan datang dan menyerukan penelitian tentang efeknya pada independensi dimensi lain dari hubungan auditor / klien, termasuk lamanya masa kerja auditor. Seperti di masa lalu, profesi akuntansi umumnya menentang peningkatan regulasi. Profesi menegaskan bahwa tidak ada bukti bahwa kemerdekaan telah rusak dan bahwa konsekuensi utama dari peraturan akan meningkatkan biaya klien dan investor (AICPA 1997). Sehubungan dengan masa jabatan auditor khususnya, profesi menegaskan bahwa ada hubungan positif antara kepemilikan dan kualitas auditor, dan itu wajib rotasi kemungkinan besar akan merusak, tidak meningkatkan kualitas audit (AICPA 1992).

Johnson, Khurana, dan Reynolds (2002) menyatakan Kongres dan regulator secara berkala mengalihkan perhatian mereka ke peran auditor dalam proses pelaporan keuangan (Kantor Akuntansi Pemerintah AS (GAO) 1996). Selama periode ini, yang sering mengikuti penipuan profil tinggi atau kebangkrutan, kedekatan hubungan audit-perusahaan-klien sering diteliti. Selama periode ini,

auditor perusahaan wajib rotasi sebagai cara yang mungkin untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Ada bukti empiris terbatas mengenai hubungan antara masa jabatan auditor perusahaan (lamanya hubungan auditor-klien) dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, tidak jelas apakah masalah rotasi wajib itu dimaksudkan untuk memecah adalah nyata atau ilusi. Dalam makalah ini, kami memeriksa apakah singkat dan masa jabatan auditor yang panjang terkait dengan penerbitan rendahnya kualitas laporan keuangan menggunakan dua proksi untuk kualitas pelaporan keuangan. Pertama, kami menggunakan yang absolute nilai akrual tak terduga untuk proksi tingkat intervensi manajemen dalam jumlah penghasilan yang dilaporkan. Kedua, kami menyelidiki sejauh mana arus akrual tetap menjadi laba di tahun berikutnya sebagai proksi untuk kualitas akrual dilaporkan dalam penghasilan periode berjalan.

Wuchun dan Huichi (2005) berpendapat bahwa The Sarbanes-Oxley Act of 2002 memperlakukan jasa audit menjadi tidak sah jika pemimpin atau mitra audit koordinasi menyediakan layanan untuk klien tertentu selama lima tahun berturut-turut. Penelitian sebelumnya yang secara empiris menguji hubungan antara hubungan klien perusahaan audit dan akrual diskresioner, mendefinisikan audit tenure sebagai jumlah tahun dimana klien telah mempertahankan "perusahaan audit" dari pada memimpin atau mengoordinasikan "mitra audit" yang dinyatakan dalam Undang-Undang. Tetapi "masa jabatan mitra audit" harus dibedakan "Audit perusahaan " dalam perdebatan tentang rotasi auditor wajib. Bahkan, kecuali perusahaan audit memiliki tenurial dan audit-mitra berkorelasi sempurna, hasil dari penelitian sebelumnya mengandung kesalahan pengukuran

dan tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk atau terhadap auditor wajib rotasi. Ada banyak literatur yang menunjukkan bahwa masa jabatan singkat audit-perusahaan memiliki efek negatif pada kualitas pelaporan. Studi-studi ini menafsirkan temuan empiris mereka sebagai dihasilkan dari kurangnya pengetahuan khusus klien di tahun-tahun awal audit dan disimpulkan bahwa rotasi auditor wajib antara perusahaan audit dapat menghasilkan kualitas yang lebih rendah penghasilan karena masa kerja auditor singkat. Temuan ini menunjukkan kelemahan potensial rotasi auditor wajib perusahaan audit. Namun, hilangnya pengalaman belajar tidak dapat dilakukan jika kebutuhan rotasi ditujukan untuk auditor dalam suatu perusahaan audit. Di Dalam studi ini, kami membedakan antara tenur audit-perusahaan dan masa jabatan mitra audit. Ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi efek potensial rotasi auditor wajib pada kualitas laba sementara mempertimbangkan dampak rotasi pada kemampuan auditor untuk mendapatkan pengalaman spesifik klien dengan berlalunya waktu.

Pengguna laporan keuangan melihat laporan audit untuk menjadi jaminan mutlak bahwa laporan keuangan perusahaan tidak memiliki material salah saji dan tidak melakukan penipuan. Namun, auditor menganggap kualitas audit dalam hal kepatuhan yang ketat dilihat dari Ketentuan GAAS / ISA. Auditor bekerja dengan sebuah perusahaan juga berusaha untuk mengurangi risiko bisnis mereka dengan meminimalkan ketidakpuasan *auditee*, menghindari litigasi, dan membatasi kerusakan pada reputasi mereka, yang bisa berhasil dari kegagalan audit. Kematian Arthur Andersen pada tahun 2002 adalah contoh hasil akhir dari kegagalan audit. Terlepas dari perbedaan dalam definisi kualitas audit, dan bahkan

ketika pengguna dan penyedia layanan audit mempertanyakan kualitas layanan audit mereka menyetujui pentingnya kualitas audit. Saya mengakui pengukuran kualitas audit bermasalah. Kualitas audit tidak langsung atau segera jelas, terutama bagi kreditor dan investor. Kontrol kualitas audit prosedur dimaksudkan untuk mempertahankan standar kontrol yang tinggi selama proses audit, tetapi kegagalan audit biasanya diketahui hanya dalam kasus kegagalan bisnis (Jasim, 2009).

Michael (2012) berpendapat beberapa alasan telah diajukan mendukung ide bahwa perusahaan besar akan cenderung memberikan pengungkapan keuangan. Satu alasannya adalah karena mengumpulkan dan memberikan informasi memerlukan latihan yang mahal dan mungkin perusahaan besar yang dapat membayar biaya pelatihan terbaik seperti. Perusahaan besar cukup mungkin untuk mengumpulkan laporan informasi yang diperlukan pengungkapan korporasi mereka untuk sistem pengelolaan dan karenanya biaya ekstra kecil mungkin yang dikeluarkan. Kedua alasannya adalah karena lebih besar ukuran perusahaan cenderung terdaftar pada bursa saham dan mereka mungkin pergi ke acara pasar saham keuangan. Lebih sering daripada perusahaan; perusahaan yang lebih kecil jika mereka adalah lebih tinggi ketergantungan terhadap pasar modal untuk pembiayaan mereka dapat menemukan kepentingan mereka untuk mengungkapkan lebih dalam laporan tahunan mereka. Di bawah ini adalah penutup pembahasan tentang dampak lanjutan dari daftar pasar saham. Alasan lain yang telah diajukan adalah bahwa perusahaan yang lebih kecil mungkin merasa bahwa lebih lengkap pengungkapan kegiatan mereka akan menempatkan mereka

ke dalam kerugian kompetitif dengan yang lain, lebih besar perusahaan yang ada di industri mereka. Oleh karena itu mereka dapat mengungkapkan sedikit informasi daripada perusahaan yang lebih besar. Perusahaan besar cenderung lebih besar di mata publik dan menarik lebih banyak riba dari instansi pemerintah, dan hal tersebut mungkin terjadi oleh, karena itu mengungkapkan lebih berpikir bahwa hal ini akan menghilangkan kritik publik atau intervensi pemerintah dalam urusan mereka.

1.1.1. Fenomena

Ketika mengetahui bahwa telah terjadi skandal akuntansi di Toshiba, seakan tak percaya bahwa bangsa yang selama ini dikenal sangat menjunjung tinggi moralitas dan etika ini, dan tentunya rasa malu, juga bisa hal seperti itu. Meskipun sebelumnya ada kasus Olympus di Jepang, namun tidak segepar Toshiba yang lebih dikenal masyarakat dunia ini.

Toshiba telah berkiprah dalam industri teknologi di seluruh dunia sejak tahun 1875, itu artinya selama 140 tahun Toshiba telah mampu mencuri hati masyarakat di seluruh dunia dengan produk yang berkualitas, brand image yang tangguh, dan layanan pelanggan yang excellent. Reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan hanya karena pressure yang sangat tinggi untuk memenuhi target performance unit.

Kasus ini bermula atas inisiatif Pemerintahan Perdana Menteri Abe pada tahun 2015 yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Atas saran pemerintah tersebut, Toshiba menyewa panel independen yang terdiri dari para

akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di Perusahaannya. Betapa mengejutkannya bahwa dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar (setara dengan Rp 15,85 triliun) sejak tahun 2008.

Panel yang dipimpin oleh mantan jaksa top di Jepang itu, mengatakan bahwa eksekutif perusahaan telah menekan unit bisnis perusahaan, mulai dari unit personal computer sampai ke unit semikonduktor dan reaktor nuklir untuk mencapai target laba yang tidak realistis. Manajemen biasanya mengeluarkan tantangan target yang besar itu sebelum akhir kuartal/tahun fiskal. Hal ini mendorong kepala unit bisnis untuk menggoreng catatan akuntansinya. Laporan itu juga mengatakan bahwa penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terus-menerus dilakukan sebagai kebijakan resmi dari manajemen, dan tidak mungkin bagi siapa pun untuk melawannya, sesuai dengan budaya perusahaan Toshiba.

Akibat laporan ini CEO Toshiba, Hisao Tanaka, mengundurkan diri, disusul keesokan harinya pengunduran diri wakil CEO Toshiba, Norio Sasaki. Selain itu Atsutoshi Nishida, chief executive dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang sekarang menjadi penasihat Toshiba juga mengundurkan diri. Panel tersebut mengatakan bahwa Tanaka dan Sasaki tidak mungkin tidak tahu atas praktik penggorengan laporan keuangan ini. Penggorengan ini pasti dilakukan secara sistematis dan disengaja.

Saham Toshiba turun sekitar 20% sejak awal April ketika isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar perusahaan ini hilang sekitar ¥ 1,67 triliun (setara dengan

RP174 triliun). Badan Pengawas Pasar Modal Jepang kemungkinan akan memberikan hukuman pada Toshiba atas penyimpangan akuntansi tersebut dalam waktu dekat ini.

Kasus akuntansi Toshiba ini tidak akan mungkin muncul ke permukaan, jika komisaris (Chairman) Toshiba tidak melakukan inisiatif membentuk panel independen ini, artinya jika dengan pengawasan biasa saja (internal audit atau komite audit), hal ini pasti tidak terdeteksi.

Demikian juga peran OJK nya Jepang yang tidak mampu mendeteksi kasus ini, dengan beranekaragam regulasi yang dikeluarkan OJK ternyata masih belum mampu mencegah terjadinya praktik kecurangan akuntansi pada perusahaan terdaftar di bursa, ini juga patut dipertanyakan.

Hal yang sama terjadi juga pada eksternal auditor Toshiba yang juga tidak mampu menemukan kecurangan akuntansi ini. Audit independen saja tidak mampu menemukannya bagaimana dengan internal audit atau OJK?

Perlu dipikirkan cara baru pengawasan untuk mencegah hal ini terulang lagi, mungkin semacam inspeksi dari komisaris perusahaan atau dari regulator (jika perusahaan terbuka). Inspeksi atau pemeriksaan khusus bisa dilakukan kapan saja dengan waktu yang tidak tentu. Pemeriksaan khusus (inspeksi) ini harus dituangkan dalam peraturan resmi (peraturan OJK atau peraturan pemerintah) agar semua perusahaan melakukannya secara bersama, termasuk didalamnya siapa yang menanggung biaya inspeksi ini. Dengan penerapan pengawasan berlapis ini tentunya akan tercipta laporan keuangan yang lebih accountable, good corporate

governance, dan tentunya kepercayaan para stake holder (termasuk didalamnya investor) akan semakin tinggi.

1.1.2. Temuan GAP

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pendapat yang berbeda. Menurut pendapat dari Felo, Krishnamurthy, dan Solieri (2003) komposisi komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Maria dan Christina (2007) sependapat dengan Felo, Khrishnamurthy, dan Solieri dimana ukuran komite audit dan presentase anggota independen komite audit memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas laporan keuangan. Sedangkan Martinez dan Meca (2014) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, selain itu dalam hal contoh kasus atau fenomena dan sampel perusahaan yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Melihat dari latar belakang diatas dimana kualitas laporan keuangan sangat diperlukan, selain itu pendapat dari beberapa penelitian terdahulu yang terjadi perbedaan tentang pengaruh dari komite audit terhadap kualitas laporan keuangan, dan juga dari kasus yang terjadi, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Tenure, Komite Audit Independen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”**.

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi masalah yang timbul yaitu:

1. Informasi laporan keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan, untuk itu kualitas laporan keuangan dibutuhkan
2. Pengaruh audit tenure, anggota independen komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan atau ruang lingkup terhadap masalah yang akan diteliti. Batasan atau ruang lingkup masalah tersebut antara lain:

1. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data skunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 - 2017
2. Faktor-faktor yang akan dilakukan penelitian yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan, antara lain:
 - a. Audit Tenure
 - b. Komite Audit Independen
 - c. Ukuran Perusahaan

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah komite audit independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan dalam perumusan masalah adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh audit tenure terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit independen terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan menjadi referensi bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Investor

Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi dan sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja emitennya.

- b. Pembaca

Bagi pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan dalam penulisan karya ilmiah tentang pengaruh dari audit tenure, anggota independen komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur.